



DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 17 Telp. (0747) 7331484

MUARA BUNGO 37214

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen ini memberikan informasi tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025. Informasi tersebut berupa Perubahan Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good Governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Demikian, terimakasih.

Muara Bungo, 25 Juli 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
IHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I (satu) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	II-4
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	II-7
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....	II-10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-16
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan dan Sasaran perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	III-5
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-7
BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025.....	IV-1
BAB V : PENUTUP	

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra S/D Semester I Tahun 2025 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	II-3
Tabel	2.2	Landasan penetapan Indikator Kinerja.....	II-6
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	II-8
Tabel	2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2025.....	II-13
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo 2021-2026.....	III-1
Tabel	4.1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bungo Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo.....	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan (DPA-P). Dengan perubahan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dan mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 memuat perubahan kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo pada semester kedua Tahun 2025. Hal ini juga dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bungo sesuai dengan Visi Bupati Bungo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo 2021-2026 yaitu “**Bungo Maju dan Sejahtera**”. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan lembaga ekonomi masyarakat. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan Daerah;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau;
3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang berbasis transparansi dan melayani; dan
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelestarian kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan

kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan kompetensi dusun.

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo ditekankan pada misi ke-1 (kesatu) yakni ***“Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan lembaga ekonomi masyarakat. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan Daerah”***.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan dalam penyusunan Perubahan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Bungo guna mendorong partisipasi aparatur, masyarakat serta Stakeholders di wilayah Kabupaten Bungo;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Perubahan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bungo sesuai Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEMESTER I TAHUN 2025

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2025, Capaian Renstra 2021-2026, Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, dan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Bab IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025.

Bab V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEMESTER I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA 2021-2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I (satu) Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2025 sampai dengan TW II/Semester I, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja program dan kegiatan pada tahun berjalan dengan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang akan disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja.
3. Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja.

Berikut disajikan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

Renja Tahun tahun sebelumnya (2024) dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo 2021-2026 TW II atau Semester I Tahun 2025.

TABEL 2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D SEMESTER I TAHUN 2025 DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

Kode					Tujuan/Sasaran/Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2026(Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu(n-2) - 2024			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n- 1) - 2025(Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n- 1- 2025(Renstra PD)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)-2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)-2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2025(Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD	100,00	85,88	91,62	86,76	94,70	94,62	86,76	91,69
1	3	5	2	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/unit pengolahan setempat	100,00	94,01	94,01	90,04	95,78	97,00	90,04	92,82
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00

1	4	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	A Predikat	BB Predikat (78,539)	A Predikat	BB Predikat	79,16	A Predikat	-	-
1	4	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,00	12 Laporan	12,00	1,00
1	4	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,00	12 Laporan	12,00	1,00
1	4	1	2	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,00	12 Laporan	12,00	1,00
1	4	1	2	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni dilokasi rawan bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	99,98	94,15	97,50	94,24	96,65	98,74	94,24	95,44
1	4	2	2	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang teridentifikasi rawan bencana di lokasi rawan bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	35,98	5,58	2,60	53,41	2,79	2,60	93,19
1	4	2	2	6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah rumah yang mendapat rekomendasi PBG/IMB	28,29	27,34	26,87	27,91	103,87	27,58	27,91	101,20
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase menurunnya area Kawasan permukiman kumuh perkotaan.	0	5,74	5,14	0,48	90,65	2,58	0,48	81,40
1	4	3	2	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan permukiman kumuh	0	7,08	21,09	3,78	82,08	10,54	3,78	64,17

1	4	3	2	3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani	100	44,74	78,92	61,87	78,40	89,47	61,87	69,15
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan Permukiman layak huni perkotaan	99,98	92,92	94,86	92,46	97,47	97,42	99,52	102,16
1	4	4	2	1	Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	99,98	70,10	86,04	70,75	82,23	93,01	70,75	76,07
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang di dukung dengan PSU	100	95,84	98,27	98,04	99,77	99,14	95,23	96,06
1	4	5	2	1	Urusan penyelenggraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	39,47	69,41	31,58	52,85	167,35	35,54	52,85	148,71
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	1 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten.	37,97	32,02	35,59	32,02	89,98	36,78	32,02	87,06
2	1 1	4	2	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase kawasan RTH Kota yang dikelola	0,25	0,12	0,19	0,12	63,16	0,22	0,12	54,55

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo memiliki indikator yang ditentukan dalam NSPK dan SPM, juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dijadikan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi, serta standar Pelayanan Publik (SPP). Penentuan/ penetapan indikator kinerja tersebut dilakukan dengan cara melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Tabel 2.2. dibawah ini akan menjelaskan hubungan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan permasalahan yang dihadapi berkaitan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dan/atau alasan atas penetapan indikator kinerja tersebut.

Tabel 2.2. Landasan penetapan Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Permasalahan/ alasan	Formulasi Perhitungan/ Sumber Data
1	Nilai SAKIP Target “BB” Prediket.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) menunjukkan bahwa nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2024 adalah 79,16 atau prediket “BB atau Sangat Baik”. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Staf/pelaksana.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi Penilaian Mandiri.

2.	Rasio Permukiman Layak Huni	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Realisasi capaian indicator Kinerja Rasio Permukiman Layak Huni pada Tahun 2024 tercapai sebesar 79,47 persen dari target sebesar 86,77, atau masuk pada kategori “Tinggi” (Skala Pengukuran Capaian Kinerja). Capaian tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Bungo masih ada Kawasan Permukiman yang tidak layak huni yakni terdiri atas : 1. Permukiman di Kawasan Rawan Bencana. 2. Kawasan Permukiman Kumuh. 3. Permukiman yang termasuk dalam kategori Desa Tertinggal. Capaian dimaksud memiliki relevansi dengan kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, sehingga perlu dilakukan kerja sama dan kordinasi yang intens dengan dinas instansi terkait.	SK. Kepala Dinas Perkim Nomor 10 DPKP Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo Tahun 2021-2026.
----	-----------------------------	--	---

Adapun Hasil analisis atas indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai SAKIP	BB Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat	BB Predikat	A Predikat (80,263)	B Predikat (78,539)	BB Predikat (79,16)	A Predikat	Realisasi capaian tahun 2024 naik dari tahun sebelumnya (2023), sebesar 0,8%
2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,78	0,82	0,87	0,91	0,96	0,78	0,79	0,79	0,83	0,96	Realisasi capaian tahun 2024 naik dari tahun sebelumnya (2023), sebesar 4%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Validasi data.

Isu ini berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yakni *"Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas"*. Salah satu risiko terbesar yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi dimaksud adalah risiko Data Luas permukiman dan Data perumahan yang didukung dengan PSU tidak valid. Adanya validasi data akan mampu mencegah dan mengurangi Munculnya kawasan perumahan dan kawasan Permukiman tidak sehat atau tidak layak huni, sehingga tujuan organisasi dapat diwujudkan.

2. Peningkatan kompetensi SDM.

Peran penting Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, menjadi salah satu alasan menempatkan Peningkatan kompetensi SDM sebagai salah satu isu penting. Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dimaksud terus dilakukan dan telah menjadi sesuatu yang dibutuhkan.

3. Revisi SK nomor 711/DPUK Tahun 2013 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Perda nomor 12 tahun 2020 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tujuan utama dari revisi ini adalah untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan kota. Perda PBG dan SK GSB yang ada sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perubahan diperlukan agar pembangunan bisa berjalan lebih baik.

Secara umum, keberadaan Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Surat Keterangan Garis Sempadan Bangunan (GSB) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim).

1. Perubahan Tupoksi dari Perizinan menjadi Pembinaan dan Pengawasan

Sebelum PBG: Dinas Perkim berperan sebagai pemberi izin (IMB)

Setelah PBG: Peran dinas ini berubah menjadi lebih pada pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen teknis yang diunggah oleh pemohon melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

2. Keterlibatan dalam Penerbitan Dokumen Teknis (GSB)

3. Penguatan Fungsi Pembinaan dan Pengendalian

Keberadaan dan revisi Perda PBG dan SK GSB secara langsung memengaruhi tupoksi Dinas Perkim, yaitu dengan menggeser fokus dari peran administratif perizinan menjadi peran yang lebih strategis dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan. Tujuannya

adalah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana tata ruang kota, memenuhi standar keamanan dan keselamatan, serta menciptakan kawasan permukiman yang lebih teratur dan berkelanjutan.

4. Peningkatan wawasan masyarakat.

Peningkatan wawasan masyarakat termasuk ke dalam salah satu isu penting yang diformulakan untuk dilaksanakan secara komprehensif. Terkait dengan Tujuan dan sasaran organisasi, kebiasaan serta wawasan sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap pola perilaku hidup sehat berdampak pada terciptanya kawasan permukiman yang tidak teratur dan tidak tertata, sehingga pelaksanaan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang kota, memenuhi standar keamanan dan keselamatan, serta menciptakan kawasan permukiman yang lebih teratur dan berkelanjutan menjadi terhambat.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Reviu terhadap rancangan awal perubahan RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan.

Dari sisi anggaran, semua usulan pada perubahan RKPD telah terpenuhi dan tidak ada perubahan terhadap program,

namun ada perubahan pada kegiatan dan sub kegiatan sesuai rencana strategis sampai dengan rancangan awal perubahan Renja, sehingga seluruh usulan perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo telah difasilitasi dalam perubahan RKPD Kabupaten Bungo 2025. Penjabaran Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil revidi terhadap perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6. dibawah ini.

Tabel 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO				53.230.978.00 0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO				26.670.043.51 1,88	- 26.560.934.488 ,12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				52.550.738.00 0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.521.561.51 1,88	- 28.029.176.488 ,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				16.338.000.00 0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.756.350.000 ,00	- 11.581.650.000 ,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah tangga di wilayah pengembangan SPALD	95 %	16.338.000.00 0,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah tangga di wilayah pengembangan SPALD	95 %	4.756.350.000 ,00	0,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/unit pengolahan setempat	97 %	16.338.000.00 0,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/unit pengolahan setempat	97 %	4.756.350.000, 00	- 11.581.650.000, 00
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat										

	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	84.197 Rumah Tangga	16.338.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	84.197 Rumah Tangga	4.756.350.000,00	- 11.581.650.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				36.212.738,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				19.765.211,51	- 16.447.526.488,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	100 %	10.421.324,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	100 %	13.470.525,81	241.778.400,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	100 % A Predikat	60.022.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	100 % A Predikat	84.843.000,00	24.821.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	35.792.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	46.808.000,00	11.016.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	24.230.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	38.035.000,00	13.805.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Keuangan sesuai SOP Laporan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 % 12 bulan	3.070.668.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Keuangan sesuai SOP Laporan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 % 12 bulan	4.814.433.881,88	1.743.765.881,88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang /bulan	1.535.334.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang /bulan	3.245.800.593,88	1.710.466.593,88
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										

	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.523.005.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.552.554.288,00	29.549.288,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.329.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.079.000,00	3.750.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 % 12 bulan	116.866.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 % 12 bulan	195.261.400,00	78.395.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.499.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.405.400,00	-93.600,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.401.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.014.000,00	-7.387.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.853.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.960.000,00	-2.893.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.401.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	16.650.000,00	-3.751.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.058.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.042.000,00	-16.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	50.654.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	143.190.000,00	92.536.000,00

		Konsultasi SKPD					Konsultasi SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		"Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia"	95 Perse ntase	515.151.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		"Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia"	95 Perse ntase	0,00	-515.151.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	515.151.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	-515.151.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi	100 % 12 bulan	6.426.630.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi	100 % 12 bulan	7.780.888.430,00	1.354.258.430,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	6.426.630.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	7.780.888.430,00	1.354.258.430,00

		Air dan Listrik yang Disediakan					Air dan Listrik yang Disediakan			
Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah penunjang rusan pemerintahan daerah yang terpelihara Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	100 Perse ntase	231.987.000,00	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah penunjang rusan pemerintahan daerah yang terpelihara Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	100 Perse ntase	595.099.100,00	363.112.100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	173.414.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	448.280.000,00	274.866.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	15.250.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	34.245.000,00	18.995.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	3 Unit	43.323.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	3 Unit	112.574.100,00	69.251.100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	156.221.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	298.762.500,00	148.930.220,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase jumlah data rumah yang teridentifikasi rawan bencana di lokasi rawan bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,79 %	95.664.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase jumlah data rumah yang teridentifikasi rawan bencana di lokasi rawan bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,79 %	103.565.500,00	7.901.500,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95.664.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	103.565.500,00	7.901.500,00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase Jumlah rumah yang mendapat rekomendasi PBG/IMB	27,58 Persentase	60.557.000,00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase Jumlah rumah yang mendapat rekomendasi PBG/IMB	27,58 Persentase	195.197.000,00	134.640.000,00

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	-	0,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	195.197.000,00	195.197.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	60.557.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	0,00	-60.557.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase menurunnya area kawasan permukiman kumuh perkotaan	2,58 %	8.896.486.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase menurunnya area kawasan permukiman kumuh perkotaan	2,58 %	403.045.000,00	864.649.000,00

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase Kawasan permukiman kumuh	1,35 Perse ntase	250.000.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase Kawasan permukiman kumuh	1,35 Perse ntase	403.045.000,00	153.045.000,00
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terleg alisasi	1 Doku men	250.000.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terleg alisasi	1 Doku men	403.045.000,00	153.045.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani Persentase Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani	89,47 Perse ntase	8.646.486.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani Persentase Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani	89,47 Perse ntase	0,00	- 8.646.486.000,00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	429 Unit Ruma h	8.580.000.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	429 Unit Ruma h	0,00	- 8.580.000.000,00

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU										
	-	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-	66.486.000,00		-	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0 0	0,00	-66.486.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase kawasan Permukiman layak huni perkotaan	97,42 %	16.020.000.00 0,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase kawasan Permukiman layak huni perkotaan	97,42 %	0,00	180.000.000,00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota		persentase jumlah rumah yang diperbaiki di luar kawasan kumuh Persentase Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	93,01 Persentase	16.020.000.00 0,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota		persentase jumlah rumah yang diperbaiki di luar kawasan kumuh Persentase Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	93,01 Persentase	0,00	- 16.020.000.000,00

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	801 Unit Rumah	16.020.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	801 Unit Rumah	0,00	- 16.020.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase permukiman yang di dukung dengan PSU	99,14 %	718.707.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase permukiman yang di dukung dengan PSU	99,14 %	5.592.878.200,00	71.870.700,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	35,54 Persentase	718.707.000,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	35,54 Persentase	5.592.878.200,00	4.874.171.200,00
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	39.930.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	0,00	-39.930.000,00

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	226.259.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	3.204.239.000,00	2.977.980.000,00
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	226.259.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	2.273.273.900,00	2.047.014.900,00
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan	226.259.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan	115.365.300,00	-110.893.700,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				680.240.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.148.482.000,00	1.468.242.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				680.240.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.148.482.000,00	1.468.242.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten	36,78 %	680.240.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten	36,78 %	2.148.482.000,00	68.025.000,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase kawasan RTH Kota yang dikelola	0,221 Persentase	680.240.000,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase kawasan RTH Kota yang dikelola	0,221 Persentase	2.148.482.000,00	1.468.242.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	88.15 Ha	117.865.000,00		Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	88.15 Ha	2.037.837.000,00	1.919.972.000,00
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya										
	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Sungai Mengkuing	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Unit	562.375.000,00		Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Sungai Mengkuing	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Unit	110.645.000,00	-451.730.000,00
				53.230.978.000,00					26.670.043.511,88	-115.577.977.342,06

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksana perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam mencari usulan program dan kegiatan dari masyarakat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo mengikuti Forum Perangkat Daerah yang melibatkan *stakeholder* guna melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2025. Pada perubahan Rencana Kerja tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo juga melibatkan kelompok masyarakat berdasarkan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterlibatan kelompok masyarakat dimaksud dalam bentuk pengaduan dan keluhan, diantaranya terhadap Pohon Pelindung yang berusia Tua di sepanjang Jalan dalam Kota Muara Bungo, juga pengaduan dan keluhan terhadap Lampu Penerangan Jalan yang mati. Pengaduan dan keluhan ini telah ditanggapi oleh unit kerja masing-masing Bidang. Diharapkan Keberadaan unit kerja ini akan mampu mengatasi dan mengurangi permasalahan yang di keluhkan Masyarakat, sehingga tujuan organisasi yakni

“Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas” dapat terwujud.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan atas Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang berkaitan atau berdampak pada pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo sebagai unsur pelaksana Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menyebutkan bahwa sesuai dengan tema RKP Tahun 2025: *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, Pembangunan Nasional diarahkan pada 6 (enam) arah kebijakan yang meliputi:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ([PE) : 5,3-5J6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini : 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8JO%; dan
6. Penurunan Intensitas Emisi GRR: : 38,6%.

Arah kebijakan tersebut di atas diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) agenda pembangunan prioritas sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim, industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil

dan makmur;

Untuk menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah, RKPD Tahun 2025 disusun mengacu pada kebijakan pembangunan daerah, dengan memperhatikan prioritas dan target nasional yang disepakati dalam Rakortekbang 2024.

Berdasarkan uraian arah kebijakan dan agenda pembangunan prioritas nasional tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo sebagai Perangkat Daerah yang termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, memiliki peran dan keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional nomor urut 3 (tiga) yakni “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta rnengembangkan agromaritim, industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi” yang merupakan urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Dalam RPJMN 2025–2029 diturunkan menjadi beberapa program prioritas, salah satunya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, yang mencakup:

1. Penguatan manajemen ASN.
2. Transformasi pelayanan publik.
3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis.
4. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja.

Peran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola tersebut dijalankan melalui:

- a. Peningkatan kapasitas aparaturnya sesuai Permen PKP No. 1 Tahun 2025 tentang penataan organisasi dan UPT.
- b. Perbaikan layanan publik perumahan sesuai Permen PKP No. 5 Tahun 2025 tentang kriteria MBR dan kemudahan memperoleh rumah.
- c. Pemanfaatan insentif PPN rumah tapak (PMK No. 13 Tahun 2025) untuk memperluas akses hunian layak.
- d. Dukungan Program 3 Juta Rumah dan Renovasi RTLH.
- e. Penguatan tata kelola rumah susun sesuai Permen PKP No. 4 Tahun 2025 (jika ada pembangunan hunian vertikal).

Dengan langkah tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Bungo tidak hanya memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga mempercepat penyediaan perumahan layak dan memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

Tujuan dan Sasaran perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 merujuk kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026. Dimana tujuannya adalah mendukung tercapainya misi ke-1 (kesatu) Bupati dan Wakil Bupati Bungo, yaitu “*Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kemajuan Daerah*”. dengan Sasaran sebagai berikut :

1. *Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi, dengan indicator Nilai SAKIP.* Sasaran ini memiliki keterkaitan dengan program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. *Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman” dengan indikator Rasio Permukiman layak huni.* Sasaran ini memiliki keterkaitan dengan program sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran dinas perumahan dan kawasan Permukiman		<i>Persentase capaian kinerja administrasi perkantoran</i>	100	100	100	100	100
	1.1.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi	<i>Nilai SAKIP</i>	<i>BB Predikat</i>	<i>BB Predikat</i>	<i>A Predikat</i>	<i>A Predikat</i>	<i>A Predikat</i>
2.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas		<i>Persentase (%) permukiman yang di dukung dengan PSU</i>	96,53	97,40	98,27	99,14	100
	2.1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<i>Rasio Permukiman Layak Huni</i>	0,82	0,87	0,91	0,96	1,00

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo serta isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2025 seperti telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka prioritas kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 antara lain:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, (Indikator Nilai SAKIP) dengan predikat “A”;
2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas, (indikator *Rasio Permukiman Layak Huni*) dengan Nilai “0,96”.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan dan penetapan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 merujuk kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bungo tahun 2025, serta mempedomani Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Tabel 2.6. Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2025, Perubahan

Rencana Kerja tahun 2025 tetap menggunakan 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 1 (satu) program operasional dan 6 (enam) program Teknis yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (program operasional), membutuhkan 5 kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan. Kebutuhan dana untuk menjalankan program ini sebesar Rp **13.470.525.811,88,-** (Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah delapan puluh delapan sen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, membutuhkan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Untuk melaksanakan program ini dibutuhkan dana sejumlah Rp **4.756.350.000,00,-** (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar;
3. Program Pengembangan Perumahan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Kebutuhan dana untuk menjalankan program ini sebesar Rp **298.762.500,00,-** (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
4. Program Kawasan Permukiman yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan. Kebutuhan dana untuk menjalankan program ini sebesar Rp **403.045.000,00,-** (empat ratus tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

5. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan. Kebutuhan dana untuk menjalankan program ini sebesar Rp 0,- (nol rupiah) yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Kebutuhan dana untuk menjalankan program ini sebesar Rp **5.592.878.200,00,-** (lima milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan. Kebutuhan dana untuk menjalankan program ini sebesar Rp **2.148.482.000,00,-** (dua milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan untuk tahun berjalan. Kerangka pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Kebijakan belanja Daerah Kabupaten Bungo diarahkan untuk efisiensi anggaran dengan tetap mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah terutama dalam meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bungo Tahun 2025 proyeksi kerangka pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bungo Tahun 2025

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO								53.230.978.000,00	30.108.913.320,54	26.670.043.511,88	-26.560.934.488,12						54.806.231.320,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								52.550.738.000,00	28.380.896.320,54	24.521.561.511,88	-28.029.176.488,12						54.057.966.320,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								16.338.000.000,00	5.610.000.000,00	4.756.350.000,00	-11.581.650.000,00						16.338.000.000,00		
1,	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								16.338.000.000,00	5.610.000.000,00	4.756.350.000,00	0,00						16.338.000.000,00		
			Persentase jumlah rumah tangga di wilayah pengembangan SPALD	97,62	96,91	94,70	94,62 %	94,62 %										97,62			
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								16.338.000.000,00	5.610.000.000,00	4.756.350.000,00	-11.581.650.000,00	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-LAYAN AN DASAR DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	masyarakat berpenghasilan rendah		16.338.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO
			Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/unit pengolahan setempat	100,02 Persentase	97,75	95,78	97 % 97,02 Persentase	97 % 97,02 Persentase										100,02 Persentase			
	1.03.05.2.01.0	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	86.921	77.328	78.628	84.197 Rumah Tangga	84.197 Rumah Tangga	16.338.000.000,00	5.610.000.000,00	4.756.350.000,00	-11.581.650.000,00						86.921	16.338.000.000,00		

	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						36.212.738.000,00	22.770.896.320,54	19.765.211.511,88	-16.447.526.488,12						37.719.966.320,00		
1,	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.421.324.000,00	13.714.867.791,54	13.470.525.811,88	241.778.400,00						10.663.102.400,00		
		Persentase urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									100 %			
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.022.000,00	204.349.000,00	84.843.000,00	24.821.000,00	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	ASN Perangkat daerah		60.623.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evalausi kinerja perangkat daerah Nilai	100 % A Predikat	78,539 BB Predikat	79,16 BB Predikat	100 % A Predikat	100 % A Predikat									100 % A Predikat			
	1.04.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	35.792.000,00	94.545.000,00	46.808.000,00	11.016.000,00						6 Dokumen	36.150.000,00	
	1.04.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	24.230.000,00	109.804.000,00	38.035.000,00	13.805.000,00						6 Laporan	24.473.000,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.070.668.000,00	4.659.926.361,54	4.814.433.881,88	1.743.765.881,88	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	ASN Perangkat Daerah		3.238.444.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
		Cakupan Pengelolaan Keuangan sesuai SOP Laporan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan										100 % 12 bulan		
	1.04.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	1.535.334.000,00	3.064.452.073,54	3.245.800.593,88	1.710.466.593,88						28 Orang/bulan	1.550.687.000,00	
	1.04.01.2.02.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.523.005.000,00	1.559.834.288,00	1.552.554.288,00	29.549.288,00						12 Dokumen	1.675.305.500,00	
	1.04.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.329.000,00	35.640.000,00	16.079.000,00	3.750.000,00						1 Laporan	12.452.000,00	

	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						116.866.000,00	330.232.400,00	195.261.400,00	78.395.400,00	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur	ASN Perangkat Daerah		118.529.900,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO
		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan										100 % 12 bulan		
	1.04.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.499.000,00	5.405.400,00	5.405.400,00	-93.600,00						1 Paket	6.048.900,00	
	1.04.01.2.06.002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.401.000,00	19.998.000,00	13.014.000,00	-7.387.000,00						1 Paket	20.605.000,00	
	1.04.01.2.06.003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.853.000,00	15.300.000,00	7.960.000,00	-2.893.000,00						1 Paket	10.961.000,00	
	1.04.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	20.401.000,00	21.780.000,00	16.650.000,00	-3.751.000,00						3 Dokumen	20.605.000,00	
	1.04.01.2.06.005	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.058.000,00	18.084.000,00	9.042.000,00	-16.000,00						12 Laporan	9.149.000,00	
	1.04.01.2.06.006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.654.000,00	249.665.000,00	143.190.000,00	92.536.000,00						12 Laporan	51.161.000,00	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		520.302.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO
		*Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	85	90	95 Persentase	95 Persentase	515.151.000,00	0,00	0,00	-515.151.000,00						100		

	1.04.01.2.07.0 000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	2	2	2	2 Unit	2 Unit	515.151.000,00	0,00	0,00	-515.151.000,00						2	520.302.000,00		
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.426.630.000,00	7.780.888.430,00	7.780.888.430,00	1.354.258.430,00	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		6.490.896.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
		Cakupan Kegiatan Perkantoran yang berjalan dengan baik	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan					100 % 12 bulan								
	1.04.01.2.08.0 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.426.630.000,00	7.780.888.430,00	7.780.888.430,00	1.354.258.430,00							12 Laporan	6.490.896.000,00	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							231.987.000,00	739.471.600,00	595.099.100,00	363.112.100,00	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		234.307.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
		Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	100 % 100 Persentase	100 % 100 Persentase	100 % 100 Persentase	100 % 100 Persentase	100 % 100 Persentase					100 % 100 Persentase								
	1.04.01.2.09.0 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	173.414.000,00	448.280.000,00	448.280.000,00	274.866.000,00							13 Unit	175.148.000,00	
	1.04.01.2.09.0 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	15.250.000,00	78.255.000,00	34.245.000,00	18.995.000,00							44 Unit	15.403.000,00	
	1.04.01.2.09.0 000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	43.323.000,00	212.936.600,00	112.574.100,00	69.251.100,00							3 Unit	43.756.000,00	

	1.04.01.2.08.0 600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.426.630.000,00	7.780.888.430,00	7.780.888.430,00	1.354.258.430,00						12 Laporan	6.490.896.000,00	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						231.987.000,00	739.471.600,00	595.099.100,00	363.112.100,00	Kab. Bungo, Rimbo Tengah, Pasir Putih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		234.307.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO
		Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	100 % 100	100 % 100	100 % 100	100 % 100	100 % 100										100 % 100 Persentase		
	1.04.01.2.09.0 600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	173.414.000,00	448.280.000,00	448.280.000,00	274.866.000,00						13 Unit	175.148.000,00	
	1.04.01.2.09.0 600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	15.250.000,00	78.255.000,00	34.245.000,00	18.995.000,00						44 Unit	15.403.000,00	
	1.04.01.2.09.0 600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	43.323.000,00	212.936.600,00	112.574.100,00	69.251.100,00						3 Unit	43.756.000,00	
2,	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					-	-	156.221.000,00	382.750.000,00	298.762.500,00	148.930.220,00						305.151.220,00	
		Persentase Rumah Layak Huni dilokasi rawan bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	99,98	97,80	96,65	98,74	98,74										99,98		

	1.04.02.2.06.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	5	1	1	1 Laporan	1 Laporan	60.557.000,00	0,00	0,00	-60.557.000,00						5	66.612.700,00		
3,	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2,58 %	2,58 %	8.896.486.000,00	530.815.000,00	403.045.000,00	864.649.000,00						9.761.135.000,00		
		Persentase menurunnya area kawasan	0,02	7,7	5,14												0,02			
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1,35 Persentase	1,35 Persentase	250.000.000,00	530.815.000,00	403.045.000,00	153.045.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dilokasi rawan bencana		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO
		Persentase Kawasan permukiman kumuh	0	4,05	2,7													0		
	1.04.03.2.02.000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP	4	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	530.815.000,00	403.045.000,00	153.045.000,00						4	250.000.000,00		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					89,47 %	89,47 %	8.646.486.000,00	0,00	0,00	-8.646.486.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dilokasi rawan bencana		9.511.135.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO
		Persentase Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang	100,02	68,37	78,92													100,02		
	1.04.03.2.03.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2145	429	429	429 Unit Rumah	429 Unit Rumah	8.580.000.000,00	0,00	0,00	-8.580.000.000,00						2145	9.438.000.000,00		

4,	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				97,42 %	97,42 %	16.020.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00						99,98	16.200.000.000,00		
			Persentase kawasan Permukiman layak huni perkotaan	99,98	92,3	94,86														
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				93,01 %	93,01 %	16.020.000.000,00	0,00	0,00	-16.020.000.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dilokasi rawan bencana		16.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	99,98	79,07	86,04														
	1.04.04.2.01.0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	4006	801	801	801 Unit Rumah	801 Unit Rumah	16.020.000.000,00	0,00	0,00	-16.020.000.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					4006	16.200.000.000,00	

5,	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										99,14 %	99,14 %	718.707.000,00	8.142.463.529,00	5.592.878.200,00	71.870.700,00							790.577.700,00	
			Persentase permukiman yang di dukung dengan PSU	100	97,4	98,27																100			
	1.04.05.2.01	Urusan Penyele nggaraan PSU					35,54 % 35,54 Persentase	35,54 % 35,54 Persentase	718.707.000,00	8.142.463.529,00	5.592.878.200,00	4.874.171.200,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat Kabupaten Bungo		790.577.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO					
			Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	39,49	27,64	31,59																39,49			
1.04.05.2.01.0		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	5	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	39.930.000,00	0,00	0,00	-39.930.000,00						5	43.923.000,00						
1.04.05.2.01.0		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																							
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	30	3	3	3 Lokasi	3 Lokasi	226.259.000,00	2.486.773.000,00	3.204.239.000,00	2.977.980.000,00						30	248.884.900,00						
1.04.05.2.01.0		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																							
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	30	3	3	3 Lokasi	3 Lokasi	226.259.000,00	5.518.463.129,00	2.273.273.900,00	2.047.014.900,00						30	248.884.900,00						
1.04.05.2.01.0		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																							
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	30	3	3	3 Laporan	3 Laporan	226.259.000,00	137.227.400,00	115.365.300,00	-110.893.700,00						30	248.884.900,00						

	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						680.240.000,00	1.728.017.000,00	2.148.482.000,00	1.468.242.000,00						748.265.000,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						680.240.000,00	1.728.017.000,00	2.148.482.000,00	1.468.242.000,00						748.265.000,00		
1,	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				36,78 %	36,78 %	680.240.000,00	1.728.017.000,00	2.148.482.000,00	68.025.000,00						748.265.000,00		
			Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten	37,97	34,4	35,59											37,97		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				0,22 %	0,22 %	680.240.000,00	1.728.017.000,00	2.148.482.000,00	1.468.242.000,00	Kab. Bungo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah PD 1. Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat Kabupaten Bungo		748.265.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO
			Persentase kawasan RTH Kota yang dikelola	0,251	0,162	0,192												0,251	
	2.11.04.2.01.0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	100,16	64,41	76,28	88.15 Ha	88.15 Ha	117.865.000,00	1.716.517.000,00	2.037.837.000,00	1.919.972.000,00					100,16	129.652.000,00	
	2.11.04.2.01.0	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																	
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup	9,984	7,04	8,02	9 Ha	9 Ha	562.375.000,00	11.500.000,00	110.645.000,00	-451.730.000,00					9,984	618.613.000,00	
		J U M L A H						53.230.978.000,00	30.108.913.320,54	26.670.043.511,88	-						54.806.231.320,00		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2025 merupakan Perubahan dari perencanaan awal untuk periode 6 (enam) bulan terakhir dari tahun 2025. Perubahan Renja mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Bungo tahun 2025, yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo untuk 6 (enam) bulan terakhir, dalam upaya optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan Renja tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan atas perubahan Renja 2025 akan dievaluasi sekaligus sebagai satu kesatuan dari Renja Tahun 2025 dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja tahun 2026; dan
3. Sebagai rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan perubahan Renja tahun 2025, maka Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo tahun 2025 akan dijabarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025.

Demikian, semoga bermanfaat, terima kasih.

Muara Bungo, 25 Juli 2025

